



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI DENGAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Tahun Sidang** : 2022-2023
- Masa Persidangan** : III
- Rapat ke-** :
- Jenis Rapat** : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari & Tanggal Rapat** : Kamis, 9 Februari 2023
- Waktu Rapat** : 10.40 s.d. 11.59 WIB
- Tempat Rapat** : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat** : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
- Acara Rapat** : Penyampaian Aspirasi terkait Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
- Sekretaris Rapat** : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 33 dari 47 orang Anggota dengan rincian

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
2. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Riyanta
4. H. Heru Sudjatmoko

5. Drs. Cornelis, M.H.
6. Ir. Hugua
7. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
8. H. Yadi Srimulyadi
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
3. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. Rezka Oktoberia
3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I. Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

C. UNDANGAN:

1. Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat;
2. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat;
3. Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat;
4. Bawaslu Sumatera Barat;
5. KPU Sumatera Barat;
6. Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat;
7. Sekretariat KPU Sumatera Barat.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota,
Ketua KPU,
Ketua Bawaslu,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Yang hadir secara fisik pada pagi hari ini dan yang hadir secara *virtual* ada 12 orang, 15 orang. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini, ditengah wabah virus corona yang semakin melandai ini. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Rapat ini tidak memerlukan kourum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi kami hanya menampung aspirasi maupun membuka forum diskusi maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir di ruang rapat ini untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan dan sesuai dengan agenda yang telah disepakati bahwa acara rapat hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum ataupun audiensi yaitu penyampaian aspirasi terkait pemilihan.

Bapak/Ibu sekalian,
Teman-teman Anggota,

Kita menyepakati bahwa rapat ini kita akhiri pada pukul, sekarang Pukul 11 kurang 15 jam di ruangan ini, kita akhiri pukul berapa Pak Gaus? Ini Pak Gaus kami tanya karena beliau yang menginisiasi rapat kita pada hari ini. Iya kita akhiri jam, paling lama jam 12 ya, atau 11.30 ya, 11.30 nanti kalau kurang, kalau ada randang kita perpanjang sampai jam 12.00 ya, kan begitu rendang apa namanya Pak Gaus, rendang yang rancaklah.

Saya atas saran dari Pak Gaus harus menyampaikan apa namanya ucapan selamat datang kepada Bapak/Ibu sekalian *ta batik puah nayak padati, padati ditariak oh sikudo pendi, alo tibo tamu nan dinanti, dum sanak DPRD Sumbar* yang selalu dihati, *rancak bana* ya?

Ke Jakarta naik pesawat, tidak lupa mampir ke Monas, selamat datang Anggota DPRD Sumbar dan KPU, Bawaslu yang terhormat kita bersatu untuk pemilu yang berkualitas.

Oleh karena itu Komisi II DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi serta sekaligus dapat berdiskusi di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini, sesuai dengan tugas pembidangan Komisi II DPR RI yaitu terkait dengan otonomi daerah, kepemiluan, peraturan negara dan pertanahan.

Untuk selanjutnya kami persilakan kepada mungkin Ketua DPRD Provinsi ya kalau waktu mencukupi nanti bisa diperoleh Bapak/Ibu Anggota ya. Oleh karena itu kami berikan waktu untuk tiga orang masing-masing selama 15 menit.

Silakan, dari mana dulu Ketua?

KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT (SAWAL, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan DPR RI beserta,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI, seterusnya,
Yang sama-sama kita hormati Bapak Komisi I dan Ibu yang hadir pada saat
sekarang ini, seterusnya,
Bapak KPU Provinsi Sumatera Barat dan,
Bawaslu Sumatera Barat,
Bapak Kepala Staff Ahli Gubernur bidang politik dan hukum Pak Jasman yang
kami banggakan,
Bapak-bapak dan Ibu, Hadirin yang kami muliakan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar tolong diperkenalkan yang di depan ini siapa?

SAWAL KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT:

Oke, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pagi ini kita masih bisa bersama-sama di Gedung DPR RI ini dalam rangka silaturahmi dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPR RI ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Baiklah pertama sekali terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terutama sekali Bapak Guspari Gaus yang telah memfasilitasi kami dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kami akan menyampaikan dan memperkenalkan diri, kami dari rombongan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yang pertama, saya sendiri Sawal, S.H. Ketua Komisi I dari Fraksi PPP, seterusnya Bapak H.Maegus Nasir, S.Pd. dari Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kemudian Bapak Disrio Putra, S.T. dari Fraksi Gerindra, selanjutnya Ibu Hj. Yuni Sairan, S.Pd. dari Fraksi Gerindra, selanjutnya Bapak H. Irsyad Ilyas Datuik Lawi Basa dari Fraksi Demokrat, selanjutnya Bapak H. Muhammad Safruda dari Fraksi PPP, kemudian Ibu Leliarni, S.Pd., M.Si. dari Fraksi PDIP, ini calon DPR RI nantinya Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang mana Ibu Leliarni ini? Oh iya kenapa *enggak* pakai merah-merah Ibu? Iya, oh iya itu gelangya sudah merah.

SAWAL KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT:

Gelangnya sudah merah Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya.

SAWAL KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT:

Kemudian Bapak Drs. Casman., M.M. staff ahli Gubernur bidang Politik Hukum dan HAM. Kemudian Bapak, Ibu, kemudian Bapak Ali, S.H., M.M. Ketua Bawaslu Sumbar, Ibu Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si. Ketua KPU Sumbar, kemudian kami didampingi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada Ibu Ismelda Jeni Reni, kemudian selanjutnya Ibu Revriel., S.Sos, Bapak Indra Wahyudi, itu rombongan kami dari DPRD Sumatera Barat Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, silakan Pak.

SAWAL KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT:

Jadi, pertama terima kasih kepada Bapak-bapak dari DPR RI ini yang telah memfasilitasi kami untuk menerima kunjungan kami dalam rangka silaturahmi.

Pertama sekali waktu kita mau kunjungan ke sini Bapak, pertama kami ingin mempertanyakan masalah Dapil untuk Sumatera Barat, dapil DPRD Provinsi Sumatera Barat tetapi setelah suratnya masuk ke sini, kemudian turunlah PKPU tentang penetapan Dapil tersebut, maka ternyata dapil untuk DPRD Provinsi itu tidak ada perubahan. Jadi, itu yang pertama yang akan kami tanyakan ke sini, kami tidak mau dapil itu dipindah-pindahkan, ternyata *alhamdulillah* itu sudah terkabul.

Kemudian selanjutnya tentang masalah pemilu ini tertutup dan terbuka, *nah* jadi kalau kami di bawah ini rasanya kami mau itu terbuka, mungkin ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Sawal Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Silakan mungkin masih ada yang lain.

MAEGUS NASIR KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT:

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya menambahkan saja sedikit Maegus Nasir dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terkait dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 sebagai masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih telah dikeluarkan dan salah satu isi dari undang-undang tersebut ada kekhasan daerah, di mana didalamnya disebutkan Sumatera Barat bercirikan *adat basandi sara, sara basandi kita baruah*, itu bagi kita masyarakat Sumatera Barat sebuah hal yang kita syukuri.

Namun demikian sesuai dengan regulasi tentu di daerah perlu adanya dukungan dari peraturan berikutnya, setidaknya-tidaknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga dengan demikian nanti baru kami bisa menerapkan undang-undang tersebut.

Kami juga mohon penjelasan kepada Pimpinan, seperti apa kira-kira tindak lanjut dan pelaksanaan daripada Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat itu, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, kita di bawah juga ada semacam kegalauan juga terkait dengan gonjang ganjing pelaksanaan pemilu ini, apakah memang 2024 itu pemilu itu terlaksana atau tidak? Kami juga minta semacam kejelasan tentu ada faktor-faktor setidaknya-tidaknya yang bisa meyakinkan bahwa pemilu itu terlaksana, itu satu, apakah dari segi anggarannya atau dari segi regulasi lainnya.

Lalu yang kedua terkait dengan adanya hari ini apa semacam gejala-gejala di daerah, mungkin di Sumatera Barat tidak begitu dirasakan seperti adanya keinginan wali, kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya, padahal kita lihat disisi lain itu mereka sudah ada keistimewaan begitu. *Nah* apakah ini tidak ada nanti semacam apa, bahagian dari konstalasi untuk mengganggu sehingga pemilu ini menjadi abu-abu. Mungkin itu saja dari saya sebagai tambahan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Masih ada? Satu lagi, iya silakan Ibu Lies, eh Ibu Leli iya.

ANGGOTA KOMISI I DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT (LELIARNI, S.Pd., M.Si.):

Baik, terima kasih atas kesempatan.

Sepanjang kami dengar tadi *alhamdulillah* sudah banyak yang ter-cover. Cuma kami dari bawah Pak dari DPRD Provinsi mungkin seluruh Indonesia juga, kabupaten/kota ini kami terkendala sekali mengenai PerPres 33. Dulu Bapak, Guspari Gauskan sudah memperjuangkan Per Pres 33, sudah sampai dimanakah tentang Per Pres tersebut. *Nah* itu dari, pokoknya setiap ada pertemuan kami sering mengumandangkan ini Pak, sampai dimana baru.

Kemudian yang kedua tadi Ketua juga sudah bilang bahwa tentang perubahan-perubahan dari dapil di Sumatera Barat, memang itu kalau bisa sesuai dengan keadaan yang sepertinya di Pasaman kan sudah sesuai. Di dapil VI itu Pak ada 5 kabupaten/kota, itu layaknya sudah dari dahulu kami coba

memperjuangkan untuk dijadikan dua sebab terlalu luas dapilnya yang dapil VI khusus yaitu 5 kabupaten/kota, Darmas Raya, Sijunjung, Padang Panjang, Sawah Lunto dan Kota dan Tanah Datar, *nah* itu sampai di mana dan gimana kira-kira kiatnya supaya bisa menjadikan dua. *Nah* itu saja Pak, terima kasih atas kesempatan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Dari KPU ada? Bawaslu?

Silakan Ibu sebelum jadi Komisioner di pusat harus di-ekspose ini Ibu.

KETUA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT (SRI):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bapak-bapak Pimpinan,
Bapak/Ibu Pimpinan Komisi II DPR RI yang kami hormati kemudian,
Ibu/Bapak Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian,
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati,

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terima kasih juga kami sudah diikutsertakan dalam konsultasi ini dan dari KPU kita sebagai penyelenggara Pak, memang di daerah ada beberapa persoalan seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari DPRD Provinsi tadi, terutama terkait dengan Dapil dan juga sistem pemilu itu sendiri. Terkait dengan Dapil sesuai PKPU No. 6 Tahun 2023 memang sudah dikeluarkan dan berdasarkan hasil yang disampaikan di dalam PKPU itu memang tidak terjadi perubahan.

Kemudian untuk sistem terbuka atau tertutup kita masih menunggu dan sekali lagi kami dari KPU Provinsi Sumatera Barat karena kita sebagai penyelenggara dan sebagai *user* dari aturan itu sendiri, kita tetap menunggu apa yang akan diputuskan oleh regulasi yang ada.

Kemudian sebagai gambaran ini mungkin juga kami sampaikan terkait dengan persiapan Pilkada mungkin ya, ini juga menjadi informasi buat kita semua karena ada pemerintah provinsi di sini. Ini memang terkait dengan anggaran, kita sekarang memang sedang melakukan penyusunan anggaran untuk Pilkada itu sendiri, karena di Provinsi Sumatera Barat ini terjadi banyak sekali pemekaran nagari Pak. Jadi perlu kami sampaikan untuk pemilu 2024 yang akan datang ini jumlah nagari yang di Sumatera Barat itu mencapai 1.264.

Sebagai contoh misalnya di Pasaman Barat itu bertambah nagarinya yaitu 71 nagari, maaf jadi 90, jadi ini yang juga akan berpengaruh terhadap anggaran kita. Kemudian termasuk juga untuk anggaran badan *Ad Hoc* yang lainnya. Sekali lagi.

Pimpinan Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Dari KPU Provinsi Sumatera Barat sampai sejauh ini kesiapan kita, kita menyatakan siap untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 dan untuk regulasi yang akan digunakan kita juga siap untuk menunggu regulasi yang ada.

Barangkali itu Bapak/Ibu sekalian, saya akhiri dengan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Ibu Sri.

Silakan Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT (ALNI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT (ALNI):

Robbisrohli Sodri wayassirli amri wahlul 'uqdatanmillisani yafqohu qouli,

Yang saya hormati Pimpinan DPR,
Pimpinan Komisi II dan,
Seluruh Anggota,
Pimpinan DPRD Sumatera Barat,
Komisi I dan seluruh anggota,
Ibu Ketua KPU Sumatera Barat.

Mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pimpinan, melalui Komisi II, ini kami sudah meminta izin juga kepada Pimpinan kita di Bawaslu RI berkaitan dengan penyampaian dan kedatangan kita ini, artinya ini bukan

berarti kami mewakili Bawaslu dalam tataran lembaga Republik Indonesia tetapi ini aspirasi kami di daerah ini Bapak Pimpinan.

Berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban kami, ingin juga kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini, berkaitan dengan kewenangan pencegahan kita, tetapi ini menjadi permasalahan besar juga di daerah kita termasuk di Sumatera Barat.

Yang pertama dulu Bapak Pimpinan, berkaitan dengan menghadapi pemilu serentak di 2024 besok ini, ada beberapa hal yang biasa terjadi di wilayah kita di Sumatera Barat. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan seringnya terjadi pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, terkhusus pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan walikota. Maka kami juga karena salah satu tugas kewenangan kita itu adalah berkaitan dengan pengawasan netralitas ASN termasuk juga dengan proses penanganan pelanggarannya. Mungkin kami berharap juga melalui Komisi II ini termasuk dengan DPR RI secara kelembagaan ini menjadi perhatian besar, berkaitan dengan keberadaan ASN yang sebenarnya menjadi bagian independensi sebuah lembaga untuk mencapai tujuan besar dari pelaksanaan pemilu ini, itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan seleksi penyelenggara pemilu, memang di 2023 ini KPU dan Bawaslu mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota di 2023 ini terjadi proses akhir masa jabatan dan pergantian komisioner. Ini menjadi tantangan besar juga bagi penyelenggara pemilu di setiap daerah, karena memang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan, penyelenggara itu hanya boleh menjabat 2 periode, memang di KPU maupun di Bawaslu masa jabatan khususnya KPU, masa jabatan itu menjadi perhatian. Kamipun di Bawaslu kalau di tingkat provinsi pun memperhatikan seperti itu, tetapi memang karena keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota itu baru tetapnya satu periode, tetapi peralihan ini menjadi problema juga apabila ternyata yang terpilih ini banyak mungkin berkaitan dengan pengalaman yang belum cukup atau orang-orang yang menjadi titipan-titipan dari pihak-pihak tertentu yang punya target-target tertentu. Jadi, ini aspirasi kami melalui Komisi II dan DPR agar rekrutment ini betul-betul menjadi perhatian besar berkaitan dengan kesuksesan lembaga penyelenggara pemilu.

Selanjutnya tentang ini mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya Pimpinan tetapi kami tidak lelah-lelahnya juga menyampaikan ini ke Komisi II berkaitan dengan keberadaan staff PPN PNS. Mungkin di Komisi II sebelum ini pernah juga menyampaikan aspirasinya tetapi kami dari Sumatera Barat terkhusus, ada juga KPU dan Bawaslu di sini kami berharap sekali karena PPN PNS ini akan dihapuskan di 2023 ini di bulan November sesuai dengan undang-undang tetapi kalau kita lihat dilematika 70% PPN PNS ini keberadaannya sangat dibutuhkan sekali oleh penyelenggara, karena memang jauh perbandingannya dengan keberadaan PNS atau mungkin rekrutmen P3 besok. Maka harapan yang kami ulang-ulang lagi di forum Komisi II ini sebelumnya kami dari Sumatera Barat juga mengutus perwakilan PPN PNS ke Komisi II ini dalam forum nasional. Kami ulangi lagi mohon ini betul-betul dapat

dipertimbangkan, karena ini adalah tahapan pemilu yang menentukan keberhasilan dari proses pemilu ini.

Selanjutnya ada juga harapan kami dan perhatian khusus tidak hanya untuk Komisi II, mungkin untuk kita hadir di sini, berkaitan dengan adanya politik uang ini. Kita berharap, kita sama-sama serius untuk betul-betul menegakkan aturan berkaitan dengan politik uang ini, karena ini adalah lembaga penyelenggara ada di sini, kami dari Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang yang diberi ranah untuk menanggapi proses penanganan pelanggaran politik uang, tetapi kesuksesannya tentu tidak hanya penyelenggara atau penegak hukum ini saja, tetapi tentu semua unsur yang berkepentingan dengan ini, itu betul-betul memahami dan betul-betul berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Mungkin itu saja dari kami sebagai lembaga pengawas pemilu, kami sampaikan sekali lagi Pimpinan, ini bukan berarti kami mewakili lembaga Pimpinan kami Bawaslu Republik Indonesia tetapi ini bahagian dari penyampaian aspirasi kami di daerah khususnya lembaga penyelenggara pemilu. Mohon maaf.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya terima kasih Saudara Ali ya, oh Alni, H. Alni, Angkatan Laut Negara Indonesia ya?

Baik Bapak Ibu sekalian,

Kita sudah mendengarkan beberapa aspirasi yang sangat mendasar tetapi ada beberapa hal yang sudah cukup jelas ya, sebelum sampai kepada anggota, kami sampaikan bahwa untuk pemekaran dari KPU, pemekaran apa namanya nagari ya 1.264 ya Ibu ya? Bertambah 90 nagari, 90 ya?

SRI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT:

Mohon izin Pimpinan, 90 itu hanya di satu kabupaten, yang lainnya juga ada, ada tiga kabupaten/kota.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Baik.

Nah begini tentang nagari ini sesuai dengan rapat-rapat kami dengan Saudara Menteri Dalam Negeri bahwa pada Bulan Juni 2022, ya beliau sudah menjelaskan ya tidak boleh ada pemekaran ya untuk desa, untuk nagari ya dan itu sudah *stop*. *Nah*, yang perlu diketahui itu pada waktu kapan ini dimekarkan, karena ini menyangkut anggaran nantinya, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang itu dimekarkan setelah Juni 2022 maka kami akan mempertanyakan kepada Saudara Mendagri nanti termasuk kepada Dirjen Akwil bagaimana sesungguhnya posisi nagari-nagari di Sumatera Barat yang dimekarkan setelah Juni 2022 karena ini berhubungan dengan anggaran. Ini juga terjadi di Riau kami sedang mengklarifikasi pada waktu kapan dimekarkan desa-desa di Riau tersebut.

Nah yang kedua tentang Bawaslu penghapusan PPNASN ataupun honorer itu Komisi II, ya kami semua di sini Pak ya sedang memperjuangkan supaya itu tidak sampai terjadi, ya karena kalau itu terjadi akan membuat situasi politik bergejolak, yang kedua kinerja setiap lembaga juga pasti terganggu. *Nah* itu, jadi kita sedang perjuangkan, mohon juga teman-teman dari DPRD Provinsi Sumatera Barat ikut ya berjuang untuk itu ya, kita tidak bisa bayangkan, jutaan itu Pak ya. Kita *enggak* bisa bayangkan itu dibubarkan, belum Satpolnya, belum tenaga kesehatan ya, belum Bawaslunya.

Bawaslu paling berpengaruh Pak, karena merekakan orang-orang yang sudah paham tentang kerja-kerja Bawaslu selama ini dan kebanyakan di Bawaslu itu honorer yang diaktifkan untuk bisa menyelesaikan kerja-kerja Bawaslu.

Tentang dapil dan alokasi suara, sudah ada dalam PKPU No. 6 2023 monggo dibaca di situ saja.

Yang kedua dari Gus Nasir Pak ya, menyangkut Provinsi Sumbar Komisi II dan pemerintah sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar tentang kekhasan Minangkabau itu Pak ya Pak Gaus, ada besan disara, saraber, bersar iki tabulah kalau *enggak* salah, ya itu sudah perjuangkan.

Oleh karena itu selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman anggota ya, siapa yang ingin menang di dapilnya silakan bicara. Mungkin Pak Gaus Sumbar di sini, Ibu Reizka sedang tugas negara.

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

Pimpinan Komisi I beserta,
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Staff eh Staff Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
Ketua Bawaslu,
Ketua KPU beserta seluruh,

Kawan-kawan yang hadir dari Sumatera Barat,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi I beserta anggota, begitu juga apa yang disampaikan oleh Ketua KPU, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya respon ini terhadap apa yang dimintakan klarifikasi kepada kami. Pimpinan dan Anggota Komisi II yang merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan terhadap apa yang ditanyakan terhadap apa yang ditanyakan.

Pertama adalah apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II tentang tertutup ataupun terbuka. Barangkali sudah dilansir oleh berbagai mass media bahwa partai-partai politik sudah menyatakan sikapnya dari 9 partai politik yang ada di DPR RI ini dari 9, 8 meminta menghimbau ke Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan pemilu ini bisa adem ayem, teduh dan lain sebagainya, karena sekarang ini proses tahapan-tahapan sedang berjalan untuk tidak membuat keputusan yang berbeda dari yang sebelumnya. Begitu juga fraksi yang ada di DPR RI ini, tadi yang saya katakan itu adalah partai-partai politik, kalau partai-partai politik tentu tidak ada ranahnya di DPR RI ini. Namun di fraksi ada 8 fraksi juga dan saya ikut hadir dalam konferensi pers itu. Juga menyatakan sikap hal yang sama dan itu dilandasi oleh karena Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan putusan terhadap persoalan yang sama, di mana pada Tahun 2028 ketika itu juga memang juga ada elemen masyarakat yang mengajukan tentang persoalan tertutup dan terbuka. Namun sikap Mahkamah Konstitusi ketika itu menyatakan bahwa pemilu kedepan yaitu ketika 2009 pelaksanaan pemilu itu sampai dengan kemarin itu dengan sistem proposional terbuka.

Kemudian juga barangkali, kawan-kawan juga mengikuti proses apa yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dimana kami DPR secara institusi diwakili oleh Komisi III itu juga sudah menyampaikan sikap dan pendapat. Berdasarkan kesepakatan di Komisi III itu dinyatakan bahwa disamping 8 fraksi, disamping institusi DPR, Fraksi PDI meminta juga berikan ruang ranah bagi kami untuk menyampaikan sikap pula, tetapi secara institusi adalah secara institusi ketika di Mahkamah Konstitusi itu DPR RI juga punya sikap yang sama dengan partai-partai politik yang 8 dan fraksi-fraksi yang ada yang melakukan konferensi pers yang 8 itu dan secara institusi, institusi.

Jadi sudah berbaur semua fraksi yang ada disini menyatakan sikap bahwa diminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan pemilu 2024 itu pelaksanaannya secara proposional terbuka. Jadi, referensi-referensi terhadap hal itu, tentu menjadi bagian kajian bagi Mahkamah Konstitusi dan itu tentu ranahnya pada Mahkamah Konstitusi tetapi yakinlah dari Ibu yang dari Sumatera Barat PDI, suara hati Ibu itu sama dengan Pak Junimart sebagai pimpinan DPR, perasaan saya ya. Begitu juga Pak Ikhsan yang PDI dari Jambi ini beliau ini tetapi itulah beberapa, saya tidak perlu mengilustrasikan terhadap hal yang demikian. Mudah-mudahan kita tunggulah mudah-mudahan MK arif dan bijak dalam menyikapi itu.

Yang kedua adalah tentang dapil. Jadi Pimpinan, saya tiga periode di DPRD Sumbar, jadi tahu persis peta-peta daerah pemilihan yang ada di situ yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang prinsip dulu saya sampaikan bahwa kesepakatan kami di DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelum keluar keputusan MK tentang bahwa tadinya sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dapil provinsi dan pusat itu adalah merupakan kewenangan DPR, kewenangan kami. Lalu muncul keputusan MK yang menyatakan bahwa semua daerah pemilihan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota itu diserahkan kewenangannya kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU.

Kami beberapa kali melakukan rapat termasuk juga konsinyering dalam menyikapi tentang persoalan itu, lalu keputusan kami adalah bahwa kita sudah memutuskan sebagaimana dikatakan oleh Ketua tadi, sudah ada PKPU No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan. Secara nasional dapilnya tidak berubah kecuali Papua. Papua kenapa terjadi perubahan karena ada empat DOB di provinsi tersebut yang itu juga adalah merupakan kewenangan dari Komisi II.

Ada penambahan empat dapil di Papua itu. Tadinya jumlah Anggota DPR Tahun 2019 adalah 575, 2024 jumlahnya menjadi 580, IKN yang sudah merupakan bahagian yang dinyatakan oleh undang-undang, IKN Ibukota Nusantara, sebetulnya itu juga sudah bisa jadi ranah dapil baru tetapi berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR bersama penyelenggara pemilu karena IKN itu masih dalam proses, masyarakatnya belum ada di IKN dan kami sudah beberapa kali juga datang ke sana dan juga pergi dengan helikopter, mamantau secara dekat, memang sedang dalam proses sehingga IKN belum merupakan Dapil baru. Jadi, itu beberapa hal, mengenai Sumbar tetap seperti biasa. Artinya bukan hanya Sumbar seluruh provinsi dapilnya sama dengan 2019 termasuk Sumbar.

Yang jadi persoalan apa yang disampaikan oleh Ibu itu mengenai Padang Panjang, Tanah Datar, Sawah Lunto, Sijunjung, Damas Raya, jumlah Anggota DPRD-nya kalau saya tidak salah 11. Yaitu perlu juga dilakukan kajian-kajian, apakah perlu dilakukan pemekaran atau bagaimana dan itu memang dalam pemikiran kami Komisi II. Namun karena kemarin ini sudah ada kesepakatan bahwa pusat dan provinsi tidak akan dilakukan perubahan, mudah-mudahan di tahun 2029 apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi bahagian dari keputusan yang akan kita tetapkan.

Kemudian mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Maegus ya Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 ini adalah merupakan produk baru dan memang ada kesepakatan dari Komisi II bersama pemerintah. Memang pemerintah meminta garansi kepada kami, tadi kami rapat internal ada 8 provinsi yang akan kita lakukan perubahan status dari alas hukum, termasuk Sumatera Utara tadi dikatakan Sumatera Selatan, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan seterusnya, ada 8 provinsi yang akan kami lakukan pembahasan terhadap alas hukum daripada provinsi itu. Yang sudah kita laksanakan diantaranya Sumbar, Jawa Barat, Jambi termasuk NTB, NTT juga sudah kita lakukan.

Kesepakatan sebelum melakukan pembenahan dasar hukum dari provinsi-provinsi yang belum tidak sesuai dengan undang-undang dasar itukan berdasarkan undang-undang tahun, Undang-Undang Dasar Sementara RIS Tahun 58, sekarang ada komitmen kami bersama pemerintah untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Dasar. *Nah*, kesepakatannya apa?

Pertama untuk prosesi ini apapun provinsinya tidak boleh merubah nama provinsi, jadi ada kawan-kawan dari Sumbar minta supaya dirubah namanya daerah istimewa sebagaimana yang diinisiasi oleh Pak Mutanain itu tidak bisa kami laksanakan, satu.

Yang kedua, tidak boleh meminta daerah istimewa, yang ketiga adalah tidak boleh meminta daerah khusus karena bagaimanapun tentu akan berdampak kepada masalah anggaran dan lain sebagainya. Sehingga yang dibenarkan itu apa, yang dibenarkan itu adalah bagaimana bisa ditampung hal-hal yang berkaitan dengan masalah kearifan lokal. *Nah*, di sinilah saya menyampaikan pendapat sebagai orang Sumatera Barat dan juga sebagai orang Minang dan saya sampaikan kepada Pak Junimart yang sangat baik hati dan beliau ini sangat legowo, sangat arif dan bijaksana. Tolong dimasukkan nilai-nilai budaya yang ada pada minang itu dan seluruh kawan-kawan di Komisi II sangat menyahuti dan memberikan apresiasi terhadap apa yang saya masukkan ini.

Dan saya minta Akbar, ini Akbar ini Staff Ahli Komisi tolong dikawal ini. Jadi, setelah kami sepakati ABSSBK adalah merupakan bagian daripada rumusan Pasal 5c itu, itu saya kawal ada *basandi sarat, sarat basandi kita bullah, adat saling kanangkari* walaupun ketua MUI protes kepada saya, bagi saya substansinya saja, apa substansinya, bahwa nilai-nilai adat budaya minang sudah masuk menjadi bagian daripada hukum positif.

Yang kedua adalah tentang nilai-nilai adat, adat itu *salingkanagari* tetapi saya lama di telephone Gus Rizal itu, Bang ini-ini tetapi yang lain juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi, kita tidak bicara tetek bengek, tidak bicara prinsip-prinsip, ya walaupun masih ada masyarakat yang pulang belum puas terhadap apa yang saya sampaikan, itu adalah, itu baru yang mampu saya tampung dan diakomodir oleh Bapak-bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II ini.

Kemudian yang berkaitan tentang yang ditanyakan Bawaslu tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 itu adalah merupakan komitmen kami dan Undang-Undang 5 14 itu tentang ASN, itu sedang kita lakukan pembahasan revisi terhadap undang-undang itu, itu masih dalam proses. Komitmen kami adalah ASN tidak boleh berpolitik, ASN pejabat, kepala daerah juga tidak boleh apa mengiring pegawai negeri atau ASN untuk apakah kepentingan pribadinya atau partainya dan lain sebagainya dan kita sedang merancang bahwa anu, apa sanksi hukum terhadap ASN kemarin itu kurang jelas, itu akan kita pertegas.

Dan sekarang sedang berlangsung dinamika diskusi di Komisi II ini tentang KASN. Apakah KASN ini akan kita lebur atau kita lakukan penguatan terhadap institusi ini, karena selama ini KASN ini hanya bersifat rekomendasi saja. Jadi, ada dia itu keadaannya ya terkesan tidak begitu greget dan lain sebagainya. Ini sedang dalam pembahasan, mudah-mudahan ke depan hal-hal yang berkaitan tentang Aparatur Sipil Negara ini akan kita benahi secara komprehensif dan lain sebagainya.

Intinya adalah kami secara terus menerus bersama pemerintah dalam menyikapi bagaimana ASN ini netral, tidak digiring oleh kepala daerah untuk kepentingan pribadinya atau partai pendukung di mana ketika itu dia terpilih sebagai. Jadi, tentu saya berharap kepada Bawaslu untuk tetap komit, tidak ada alasan bagi kepala daerah, tidak ada alasan bagi para ASN untuk terlibat kedalam hal-hal yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu.

Barangkali itulah beberapa hal yang bisa saya sikapi terhadap pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh kawan-kawan dari Provinsi Sumatera Barat, mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan arti dan juga menjadi berkat dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama.

Mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA.,B,Comm., ME.Con.):

Ketua-ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, bilang makasih dulu saya Pak dengan Pak Guspari Gaus, nanti beliau marah-marah lagi Pak, ini Pak Guspari tukang marah di sini Pak, iya Menteri saja dimarahin sama beliau.

Terima kasih Pak Guspari Gaus.

Silakan.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih, saya duluan atau Ihsan dulu?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ihsan, silakan Pak Ihsan.

Pak Ihsan, Silakan Pak.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.Comm., ME.Con.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati Pimpinan Komisi II beserta seluruh Anggota,
Yang saya hormati kawan-kawan dari DPRD Provinsi Sumbar,
Bawaslu dan KPU,

Mungkin saya langsung saja Pimpinan, menyikapi permasalahan pemilu 2024 yang akan kita sukseskan bersama. Saya tidak akan bertanya dan tidak akan apa namanya berdiskusi panjang lebar, hanya ingin memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana dinamika kepemiluan kita.

Yang tadi Bapak tanyakan, apakah ada kesengajaan ketika ada isu-isu atau ada ide-ide baru yang menurut saya agak sedikit *nyeleneh* begitu ya, yang muncul pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang sangat memungkinkan untuk mempengaruhi jalannya tahapan pemilu.

Jadi, kami berharap kita semua sebagai *stakeholder* pemilu bisa berkontribusi dalam hal menjaga kondusifitas ya, kondusifitas penyelenggaraan pemilu.

Saya mengambil contoh seperti ini, mulai dari usulan jabatan kepala desa diperpanjang 9 tahun, kemudian diikuti dengan dinamika atau pemilihan komisioner yang menurut saya cukup berliku-liku. Saya rasa baru sekali dalam sejarah pemilihan komisioner pada saat itu sistem noken di Komisi II, betul Pak Pimpinan ya? Jadi anggota tidak nulis nama Pak, diwakili oleh Kapoksinya masing-masing, karena untuk menjaga sekali lagi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu. Sampai-sampai pemilihan komisioner saja itu akhirnya harus dipastikan semuanya berjalan dengan baik. Karena kalau kita pakai sistem yang lama pasti ada yang *nyeleneh* saja itu. Ada yang nulis nama lain, ada yang ini, ada yang itu, akhirnya untuk menjaga kebersamaan dan kekompakkan pakai sistem noken.

Terakhir kemarin kami rapat dengan apa, KPU membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan wewenang atau kewenangan kepada KPU untuk mengatur daerah pemilihan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di dapil itu sendiri. Ini kemudian bisa berakibat panjang kali lebar Ibu/Bapak, karena kalau kita bahas kembali daerah pemilu itu dan kita ubah. Padahal pemilu tinggal kurang dari satu tahun ya, 14 Februari itu berarti oh sebentar lagi ya, hampir satu tahun lagi. Itu kalau mau dibahas semua pasti

kisruh, mau bahas DPR RI dapilnya pasti ramai, karena teman-teman juga, ya kalau mau nantilah setelah 2024 kan seperti itu ya.

Akhirnya kemarin diputuskan karena ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari yaitu daerah pemilihan di kabupaten/kota karena dinamikanya perkembangannya evolusi desa maupun kabupaten/kota itu luar biasa, pertumbuhan penduduknya kemudian perubahan kesejahteraan sosialnya itu sangat *kolotile*, sangat naik turun gitu. Jadi, mau tidak mau harus diubah dapilnya.

Nah ini sangat punya konsekuensi dan punya dampak yang cukup besar karena kita paham, kita paham betul sama-sama politisi ini ya Ibu ya? Ketika belum ada e-KTP itu yang namanya data penduduk itu acak aduh begitu Pak, *double* banyak.

Belum lagi ada ketentuan misalnya di bidang pertanahan itu atau apa di beli mobil kalau tidak salah atau beli tanah, diharuskan KTP-nya KTP setempat itu zaman dulu tetapi sekarang sudah diubah.

Sehingga orang membeli tanah itu, misalnya saya aslinya dari Jambi mau beli tanah di rumah orang tua saya di kampung saya di Suliair misalnya, *nah* itu saya harus punya KTP Suliair misalnya begitu ya. Saya ayah saya dari Kabupaten Solok, asli dari sana.

Nah, jadi itu yang membuat KTP itu jadi banyak Pak, *double-double*. Sehingga kami temukan kemarin dari 540-an kabupaten kota yang ada di Indonesia itu diharuskan oleh MK, *sorry* oleh Undang-Undang No.7 data yang dipakai adalah DAK II, 16 bulan paling lama, *sorry* paling lambat. Jadi kalau 16 bulan kita hitung 14 Februari berarti bulan 2 2024 maka data yang dipakai adalah bulan 10, bulan 8 2022, *sorry* pemilunya 2024 tarik mundur 16 bulan berarti bulan 8 2022. Karena ketentuan Depdagri itu apa pemukhtahiran data itu per semester ya, per bulan 6 dan bulan 12 maka yang dipakai DAK-nya adalah semester 1 2022 dan ketika itu kepala-kepala daerah belum waspada atau belum *ngeh* begitu ya. Belum-belum paham bahwa data yang disetor semester 1 2022 itu akan mempengaruhi jumlah Dapil, jumlah kursi yang ada di Dapil Bapak/Ibu masing-masing. Akibatnya 45 kabupaten/kota bertambah dan 8 kabupaten/kota berkurang kursinya. Dan 8 itu dan 45 bertambah kurangnya itu bukan satu dua karena dia ada *range*-nya, kalau *enggak* salah 20.000 sampai 200.000, 300.000 itu 35, 30 ya Bang ya, diatas 300.000 itu 35. Artinya kalau dia 290.000 saja tetap 30, atau 299.999 itu tetap 30. Ketika dia naik di 300.000, satu itu jadi 35, 5 kursi. Ini yang harus kita rubah kembali tetapi jangan sekarang begitu Pak. Nanti 2024 kita coba formulasikan lagi Undang-Undang Pemilu itu supaya lebih adil ya, kita cari mana yang lebih banyak manfaat daripada mudorotnya. Karena menurut saya kalau *range*-nya terlalu lebar kursinya juga jadi konsekuensinya langsung 5 Pak hilangnya.

Saya *enggak* tahu Sumatera Barat ada yang hilang *nggak*, kalau daerah saya ada di Jambi di Sarunglangun dan itu terjadi karena e-KTP pada saat itu mulai diberlakukan sehingga menjadi *single identity number*. Maka seperti di Sarunglangun mungkin banyak yang dulu dibanyakkin penduduknya untuk bisa

dapat *enggak* tahu saya PKH atau BPNT atau apa, ya itu turunnya 40.000 bahkan ada yang 200.000 waktu itu Pak.

Ini kita tanya sama Depdagri ini ada apa? Apakah ada *genue side* begitu, pembunuhan secara massal begitu, apa ada *natural disaster* begitu atau ada bencana kelaparan dan seterusnya? Ternyata tidak, karena memang banyak yang ganda. Untuk *me-renew* atau *me-recovery* data itu, itu *enggak* gampang, karena teman-teman Dukcapil itu harus balik lagi ke daerah-daerah.

Jadi, saya hanya ingin memberikan apa ya, gambaran sedikit kepada Bapak/Ibu bahwa kami di Komisi II itu bekerja sebaik mungkin dan kami pilih mana yang terbaik dari yang terburuk.

Terima kasih Ketua.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Pak Ihsan.

Silakan, Pak Ongku.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Yang saya hormati Pimpinan,
Kawan-kawan Komisi II dan juga dari DPRD Sumatera Barat,
KPU Sumatera Barat dan juga dari,
Bawaslu Sumatera Barat,

Saya tidak seperti Pak Gaus dan juga Pak Ihsan mereka ini menguasai masalah betul-betul ini, karena mereka ini orang lama, kalau saya orang baru Ibu, mau nyaleg lagi tetapi ya masih belum tahu ini terbuka atau tertutup. Saya anak baru, kata orang itu *new kids on the block* saya baru tiga bulan di sini. Saya ini PAW dari Partai Demokrat, tadi saya *notice* di sini ada Partai Demokrat satu dari ujung sana, ya.

Jadi, saya tadi itu sebetulnya hanya ingin mengomentari tentang Bawaslu tadi ya, *concern*-nya kawan-kawan dari Bawaslu atau aspirasi yang disampaikan tadi adalah bukan katanya membawa bahasa atau misi daripada Bawaslu secara kelembagaan ya tetapi adalah dari aspirasi Bawaslu di daerah ya Pak ya.

Tadi mengenai ASN yang tidak netral sebelumnya, ya memang menjadi *concern* kita juga di Komisi II ya. Dari dulu kita paham apalagi di 2019 itu konon ceritanya netralitas itu sangat, pada saat itu sangat rawan, bukan hanya ASN tetapi juga APH juga ikut-ikutan bermain pada saat itu. *Nah*, ini juga sering kami pertanyakan di sini karena Gakum itu sendiri ya itukan terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu. *Nah*, walaupun secara institusi koordinatornya adalah Bawaslu tetapi yang Bawaslu itu tidak punya kekuasaan untuk penegakkan hukum, tetap adanya di Gakumdu itu. *Nah*, di sinilah titik rawannya kalau seandainya APH itu juga ikut, "oknum-oknumnya ikut bermain di lapangan", bagaimana nanti Gakumdu akan melakukan penegakkan hukum. Namun ada yang menjadi apa namanya itu penghiburanlah, atau katakanlah boleh saya bilang itu sebagai pengobat bahwa sekarang itu digalakkan lagi yang disebut pengawasan partisipatif dari masyarakat, ada yang disebut dengan pojok desa, ada pojok pengawasan desa, ada segala macam itu.

Nah, mungkin dari Bawaslu kalau boleh saya bersaran adalah itu yang ditingkatkan ya, pengawasan partisipatif itu. *Nah*, ini mungkin sosialisasinya harus dari sekarang ini, karena kadangkala masyarakat itu tidak tahu bahwa mereka berhak mengawasi.

Sekarang itu, sebetulnya bukan sekarang saja dari dulu juga sudah ada, hanya saja ini sekarang lebih kita sosialisasikan lagi supaya pengawasan partisipatif ini lebih, lebih intens lagi. Dengan harapan tentunya kalau banyak masyarakat yang mengawasi ya, permainan-permainan oknum-oknum tadi, baik oknum ASN tertentu atau oknum-oknum APH dan sebagainya itu akan terminimalisir. Mekanismenya bagaimana, pelaporannya itu sudah diatur tetapi yang saya pikir adalah kawan-kawan dari Bawaslu mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana prosedurnya, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa terdaftar sebagai pengawas partisipatif. Kalau saya tidak salah harus ada lembaganya dan sebagainya, nanti dia mendaftar di kecamatanlah itu Panwaslu dan sebagainya. *Nah* itu yang mungkin perlu dilaksanakan Pak ya.

Jadi, saya apa namanya menekankan pentingnya pengawasan partisipatif ini, terutama kalau di kota-kota, kalau di kota-kota inikan orangnya lebih kritis dan lebih berani, *nah* mudah-mudahan dikota-kota tereliminir itu persoalan-persoalan apa namanya ketidaknetralan tersebut. Namun kalau di desa-desa atau di daerah pelosok orang juga takut, LTPH juga takut ya. Apalagi ada sedikit istilahnya itu bahasa mohon maaf ini bahasa premannya injak-injak kaki namanya ya, injak-injak kaki sedikit sudah ketakutan masyarakat itukan. *Nah*, ini.

Kemudian juga pengawasan terhadap *money politic*, ini juga barangkali juga harus lebih ketat lagi Gakumduanya bagaimana ya. Saya sih berharap kalau mengemis selalu ada Pak, pastilah karena banyak orang yang punya kepentingan. Pasti saja ada itu, pemanfaatan posisi dan sebagainya dan sebagainya ya.

Pak Bawaslu,

Mohon maaf ini, jangan-jangan oknum Panwaslunya sendiri pun ada juga yang ikut bermain begitu ya, di titik-titik tertentu di TPS, biasanya itu atau KPU-nya sendiri juga ikut. Ya saya tidak menuduh tetapi pelaksanaan dilapangan kadang kala itu terjadi. *Nah*, ini yang perlu juga diawasi secara lebih ketat menurut saya, baik dari institusi KPU-nya maupun dari masyarakatnya. Saya sangat berharap dengan pengawasan dari masyarakat.

Kemudian mengenai ASN tadi apa namanya tugas petugas *Ad Hoc* yang sekarang *enggak* jelas ini posisinya. Kita sudah berjuang dan masih kita perjuangkan bagaimana supaya ada kejelasan nanti. Karena inikan kita pemilu inikan waktunya juga sudah mepet ya, sementara waktu itu kita pernah usulkan supaya KPU itu diseragamkan bulan Mei ya, tetapi ternyata Perpunya keluarnya tidak diseragamkan, sehingga nanti akan terjadi ada KPU yang berakhir masa dinasnya itu bulan Oktober, ada yang berakhir di bulan Januari dan sebagainya.

Nah ini juga solusinya belum tahu kita nanti seperti apa, apakah diperpanjang sampai dengan selesainya pemilu 2024 ataukah bagaimana? Itu juga masih kita bahas lagi nanti itu tetapi sekarang yang terjadi adalah Perpunya mengatakan bahwa tidak ada penyeragaman, belum ada penyeragaman. Sementara kalau Bawaslu dari dulu memang sudah seragam ya, sekarang saya kira kalau tidak salah Agustus ya Pak ya pemilihan lagi Agustus kalau *enggak* salah Bawaslu ya?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT (ALNI):

Kalau di Bawaslu ini yang tidak seragam ini jumlahnya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar-sebentar di sini ada aturan mainnya, lewat Pimpinan dulu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT (ALNI):

Siap salah.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan Pak Ongku.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Ya ya tapi artinya begini kalau Bawaslukan sudah ada keseragaman waktulah, jadi ya mungkin soal sudah dua kali tidak terpilih lagi nanti dan seterusnya dan seterusnya mungkin itu ya memang sesuai ketentuannya begitu. Tetapi kembali lagi kita di Komisi II juga tetap masih memikirkan itu supaya tidak terjadi keriuhan-keriuhan yang tidak perlu nantinya. Karena ini berbahaya buat kita, apalagi di ujung-ujung, terutama petugas KPU ya yang nantinya selalu di komisioner KPU yang nantinya itu yang diakhir masa jabatan misalkan Januari, ada beberapa kota itu, kabupaten kota yang di bulan Januari itu berakhirnya ada yang bulan Oktober, ada yang bulan Januari. *Nah*, ini memang masih menjadi pemikiran kita semua dan kita akan terus bahas ini supaya ini tidak terjadi dikeriwehan-keriwehan.

Saya kira dari saya barangkali itu, Ibu yang dari PDI ini, mudah-mudahan terpilih nanti mendampingi Pak Junimart nanti di sini, mudah-mudahan pula bisa bergabung di Komisi II kan ya. Inikan tadi saya lihat saya perhatiin yang hadir di sini ini, secara fisik ini dua dari PDI, dua dari PAN, dua dari Demokrat ini ya. Terus ada satu dari PKS, oh ada dua sekarang dari PKS, sekarang dua PKS ini, jadi ini dua-dua ini ya *alhamdulillah* ya. Jadi ya saya kira mudah-mudahan lah Ibu ya.

Terus saya juga mengapresiasi syukur *alhamdulillah* ini Sumatera Barat ini banyak dapat perhatian sampai diakui dalam undang-undang ABS tadi apa *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* ya. Ini sudah hampir-hampir mirip dengan daerah istimewa begitu, walaupun tidak secara eksplisit disebut daerah istimewa Sumatera Barat tetapi sudah mempunyai keistimewaan sendiri ini sebetulnya.

Jadi, saya kira selamat lah untuk Sumatera Barat. Saya orang Sumatera Utara berbatasan dengan Sumatera Barat Pak, orang Padang juga saya tetapi Padang Sidempuan, saya Sumatera Utara II dari Partai Demokrat, barangkali demikian Ketua.

Mohon izin terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih Pak Ongku.

Ini beliau kayaknya orang klenik juga kayaknya ngitung-ngitung Pak, kita ngitung-ngitung tadi Pak dua, dua, dua, dua iya kan. *Nah* ini Pak Ongku Sumatera Barat ini mestinya apa namanya, semakin semangat karena hampir semua jalan di sana itu mulus Pak, iya kan. Saya dari Padang ya Solok, Sawah Lunto ya Sijunjung, terus satu lagi ini sampai saya Danau Singkarak itu sampai ke Bandara mulus semua Pak, iya kan?

Sumatera Utara *wallahualam* Pak, *nah* itu tugas Pak Ongku lah, ya di mana? Sumatera Barat toinya itu Pak kebetulan kami pernah Kunker masalah tanahnya Pak, tanahnya di sana. Ini tugas teman-teman dari DPRD Provinsi untuk menyelesaikan itu Pak, tanahnya saja Pak, itu sedikit saja itu, kalau *enggak* salah lebih kurang hanya 10 atau 13 km tanah urusan ninik mamaklah itu, begitu Pak.

Ada yang lain?

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Ada Ketua, satu menit.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan tiga menit juga bisa Pak Wahyu.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Enggak terlalu lama tiga menit.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan. Ayo Pak Wahyu.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat Pimpinan Komisi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Pimpinan Komisi II DPR RI beserta kawan-kawan,
Kawan-kawan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat serta,
KPU dan Bawaslu,

Saya Wahyu Sanjaya dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan salam terutama khususnya untuk Bapak Irzal Ilyas dari Fraksi Partai Demokrat ya dan Ibu Yeti dan Bapak Alni dari Bawaslu serta Pak Yanu, eh Ibu Yanu dari KPU, salamnya bukan dari saya Bapak/Ibu tetapi dari Ibu Reizka.

Ibu Reizka tidak bisa hadir hari ini karena beliau termasuk salah satu yang sedang ditugaskan oleh Fraksi Partai Demokrat untuk tetap memperjuangkan proposional terbuka, kita berdoa semua bahwasannya apa

yang sudah kita jalani selama ini, semoga itu tetap bisa terbuka iya kan? Iya, karena jujur saja walaupun kawan-kawan di sini ada yang merah tetap sebagian besar berharap terbuka.

Kemudian tadi ada saya ingin menyampaikan respon terhadap pemilu yang ditunda, memang mungkin itu doa sebagian besar *incumbent* Pak iya tetapi rasanya itu tidak akan terkabul menurut saya, karena sampai hari ini kami belum mendengar ada masuk prolegnas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita mau penundaan pemilu itu, bukan hanya undang-undang tetapi harus di Undang-Undang Dasar karena di Undang-Undang Dasar dinyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jangankan perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan undang-undang saja tidak mau Bapak Ketua. Karena itulah banyak hal sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi tidak mungkin direalisasikan dan dilaksanakan karena kita cuma bisa mempergunakan Perpu yang terakhir, kira-kira seperti itulah.

Kemudian saya berharap karena singkat kata pemilu itu tidak diundur ya Pak ya dengan segala keajaiban yang ada saat ini, itu agar KPU dan Bawaslu tetap mengawal proses pemilu ini dengan baik dan benar dan memahami ada kekurangan di sana sini. Terutama terkait masalah anggaran tetapi itu menurunkan niat kita untuk mensukseskan pemilu di 2024 ini. Terkait masalah data tadi sudah sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Ihsan Yunus yang dari Jambi Pak Ihsan Yunus ini orang Indonesia benar, kadang saya pikir dia orang Palembang tetapi barusan dibilang orang Padang lagi, tetapi yang jelas bukan orang Sumut Pak.

Iya, jadi memang mudah-mudahan setelah ini kita akan lebih berhati-hati lagi dalam masalah pendataan akan tetapi menjadi sulit bagi kita untuk merubah itu pada saat-saat terakhir. Kalau istilah kawan-kawan di Komisi II pertandingan bolanya sudah dimulai Pak, tidak mungkin aturannya dirubah ditengah jalan, tiba-tiba misalnya *off set* tidak berlaku seperti itukan. *Nah*, ini kita ini sudah setengah jalan menuju pemilu, tinggal beberapa hari lagi. Hampir kalau boleh dikatakan tidak sampai setahun kurang tiga hari, betul kan? Kira-kira seperti itu.

Saya rasa itu saja, terima kasih sekali lagi atas kunjungan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DPRD Provinsi Sumbar dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari KPU dan Bawaslu. Kami berharap agar ini bukan kunjungan yang pertama, sering-sering berkunjung ke sini, terutama terkait provit tiga-tiga yang Bapak suarkan itu.

Saya menyayangkan sekali, kenapa sampai hari ini dari asosiasi itu belum pernah Pak, berkonsultasi dengan Komisi II, belum pernah secara resmi, berapa kali, karena seringkali begini ya Pak ya.

Dulu ada yang mengurus masalah honorer, guru honorer mengurus ke Komisi X Pak, padahal *domain* guru honorer itu memang gurunya di Komisi X secara teknis tetapi masalah honorer atau ASN itu adanya di Komisi II bukan di Komisi X seperti itu.

Saya pernah mendengar bahwasannya ada kawan-kawan asosiasi menemui Sekab terus menemui Menteri Polhukham, Menkopolhukham ya bagus-bagus saja sih Pak tetapi itukan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya begitulah. Lebih baik Bapak datang ke Komisi II dan kita membikin mencarikan solusinya bersama-sama.

Permasalahannya mungkin sekarang kesulitannya adalah karena kita sudah dekat dengan pemilu sehingga setiap orang berpikir sekarang bagaimana masalah pemilu. Pemilu belum terpikir yang sekarang datang terpikir adalah terbuka atau tertutup, kan seperti itu kan.

KPU juga bingung itu Pak, cetak *enggak* surat suaranya, cetak *enggak*, nama dan foto kita bisa hilang semua Pak dari surat suara dan gambar Baliho itu kalau misalnya jadi tertutup.

Saya rasa itu saja Ketua, terima kasih.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Wahyu.

Cukup ya. Eh ada Ketua kita ini, Pimpinan BKASP, baru dari Itali pemilihan beliau.

Silakan Pak, *mangga*.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Dari Yogya.

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

*Alhamdulillah,
Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ama
badhu,*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan dan Anggota wabil khusus,

Untuk tamu istimewa kita dari Sumatera Barat,

Bahagia sekali, tadi saya dengar beberapa hal terus *online* juga ada teman-teman.

Dua hal saja saya ingin menyampaikan. Yang pertama, apresiasi karena inisiatif datang kemari, kadang-kadang birokrasi itu membuat informasi dari bawah sampai ke atas dua hal, satu lambat, satu juga ada distorsi. *Nah*, kalau langsung kaya gini kita jadi bisa melihat fakta dan data serta analisa lapangan.

Kadang-kadang yang datang ke sini yang sering kita undang akademisi dan akademisi itu bagus secara teoritis, tetapi kita kadang-kadang perlu secara empiris, secara lapangan. Pengalaman saya di politik kadang-kadang teorinya kalah sama praktek di lapangan, karena di lapangan itu dia sudah jadi budaya, dia sudah jadi adat, jadi kebiasaan yang itu harus betul-betul sangat dihargai.

Yang kedua, karena Indonesia ini demikian luas jadi tiap daerah, tiap unit itu punya kekhasan, keunikan yang itu di demokrasi mustinya itu tidak diseragamkan, karena itu waktu kita sumpah pemuda, kita bukan berbahasa satu, bukan, berbahasa persatuan yang satu bahasa Indonesia. Artinya bahasa daerahnya, adat budaya daerah tetap hidup termasuk bukan cuma *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah* tetapi memang *uniqueness* dari sejarah, history, sosiologis, filosofis setiap daerah itu berbeda. Karena itu di Papua hingga saat ini kita masih membolehkan sistem noken begitu loh, pakai sistem noken, sesuatu yang sebetulnya desa sendiri kalau Pak Gaus ini, kitakan dan sebutan lainnya nagari termasuk, Bali kemarin juga, saya apresiasi apa masukkan dan inisiatifnya.

Yang kedua, mungkin Pimpinan dan Ketua karena pintu revisi Undang-Undang Pemilunya sudah tertutup yang ada sekarang memang PKPU begitu. Perpu juga sudah kemarin, *nah* mungkin pandangan saya beberapa masukkan ini layak kita perjuangkan Pak Gaus untuk perbaikan pemilu ke depan. Tetapi kalau yang 2024 ini kita masih ada beberapa PKPU yang bisa bahas atau Perbawaslu atau dengan DKPP mudah-mudahan beberapa masukkan tadi, bisa kita akomodasikan.

Nah, jangan lupa terus berhubungan dengan semua, karena di Komisi II tadi Pak Ongku bilang kita ada partainya tetapi secara umum kita sebenarnya partai Komisi II, mau dari PAN Pak Gaus, mau dari PDIP Pak Junimart, dari PKS, kemudian dari Demokrat, semuanya sebetulnya kita partai Komisi II. Ketika sudah sampai kepada peraturan kita ingin membangun Indonesia yang maju, sejahtera dan adil buat kita semua.

Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Bapak Ketua dari PKS.

Saya *enggak* berani sebut nama beliau Pak, cukup ya, jam 12 kurang empat ya.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan adanya interaksi dan diskusi pada pertemuan kita pada pagi, siang hari ini, tentu semua kami tampung dan tentu nantinya hal-hal yang memang harus kami sampaikan kepada kementerian terkait, kami akan sampaikan, termasuk kepada Kemendagri tadi, termasuk Kemenpan mengenai honorer ya.

Kalau provit tiga-tiga itu Ibu, ya itu istilah kita itu provit tiga-tiga iyakan, tentu ini menjadi bukan kewenangan, menjadi tuntutan hati dari kementerian, kementerian keuangan ya. Jadi Kemendagri yang kami dapatkan informasi bahkan dokumennya mereka sudah mengajukan peninjauan terhadap apa namanya provit tiga-tiga itu, tetapi kamikan tidak bisa menunjukkan dokumennya Ibu, karena punya dokumennya, masih dalam telaah Kementerian Keuangan. Iya kita berdoalah, apalagi doa dari Sumatera baratkan sangat luar biasa, kalau memang betul-betul didoakan ya.

Demikian Bapak/Ibu sekalian, pertemuan kita hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir dan Anggota Komisi II yang sudah memberikan waktu yang sangat berharga pada hari ini dan nanti kita jam satu masih ada RDPU ya Bapak/Ibu sekalian, jadi mohon waktunya juga, ya.

"Sawah tamantrang di tapi muaro, anak gubalo mamancing lawak sapu-sapu, kito bertamo di hari kamisko la salahsai pulo diskusi banyak untuk pamilu."

"Iya mencari kerak telur ke ibukota dari bahan dasarnya, di Senayan kita bertatap muka untuk memajukan Indonesia Raya, merdeka."

Demikian Bapak/Ibu.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.59 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *Mahmud*

Mahmud, S.E.

NIP. 196508021988031002